

JOINT STATEMENT INDONESIA-CHINA: ANALISA DAMPAK KERJA SAMA PADA BIDANG MARITIM TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DI LAUT NATUNA UTARA

Isthiqosah Shalsa Naqiyah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 2024

Revised December 2024

Accepted December 2024

Available online Oktober 2024

Korespondensi: Email :

shalsaanqyih@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstract

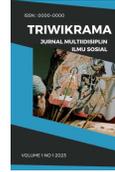
Indonesia and China have established diplomatic relations since 1950. The relationship continues and develops to this day. Both countries are involved in various agreements and cooperation. On November 9, 2024, Indonesian President Prabowo Subianto together with Chinese President Xi Jinping agreed to a Joint Statement or cooperation in the maritime sector. However, this cooperation has become a controversial issue because of the pros and cons from various parties who consider this cooperation to threaten the country's sovereignty over the North Natuna Sea area which is a disputed area between Indonesia and China. This study aims to analyze the impact of the Joint Statement on the country's sovereignty in the North Natuna Sea. The method used in this study is a qualitative approach

with secondary data (articles, news, and books) as the main data source. This study found that there are positive and negative impacts of the Indonesia-China cooperation. On the one hand, this cooperation can strengthen diplomatic relations and improve the economy of the two countries. However, this cooperation can also pose a threat to Indonesia's sovereignty, especially in the North Natuna Sea area which is Indonesia's EEZ (Exclusive Economic Zone).

Keywords: *Cooperation, Joint Statement, maritime, nine-dashed line, north Natuna sea*

Abstrak

Indonesia dan China telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Hubungan tersebut terus berlanjut dan berkembang hingga saat ini. Kedua negara terlibat dalam berbagai kesepakatan dan kerja sama. Pada 9 November 2024 Presiden RI Prabowo Subianto bersama dengan Presiden China Xi Jinping menyepakati *Joint Statement* atau kerja sama di bidang maritim. Namun, kerja sama ini menjadi isu yang kontroversial karena pro-kontra dari berbagai pihak yang menilai kerja sama ini akan mengancam kedaulatan negara atas wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah sengketa antara Indonesia dengan China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari *Joint Statement* tersebut terhadap kedaulatan negara di Laut Natuna Utara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan data sekunder (artikel, berita, dan buku) sebagai sumber data utama. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dampak positif dan negatif dari jalinan kerja sama Indonesia-China. Di satu sisi, kerja sama ini dapat mempererat hubungan diplomatik dan meningkatkan perekonomian kedua



negara. Namun, kerja sama ini juga dapat menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia.

Kata kunci: *Joint Statement*, kerja sama, laut Natuna utara, maritim, *nine-dashed line*

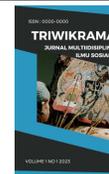
LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (GIS), Indonesia tercatat memiliki luas wilayah daratan dan perairan sebesar 8,3 juta km persegi (Fadhillah & Adhi, 2022). Secara lebih rinci, luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1,9 juta km persegi. Luasnya wilayah daratan yang didukung dengan kondisi iklim tropis serta tanah subur memungkinkan negara ini untuk mengembangkan potensi pada bidang agraris. Namun, potensi yang dimiliki tidak terbatas pada bidang agraris semata. Pada kenyataannya, potensi terbesar dari negara ini terletak pada bidang maritim. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa wilayah laut Indonesia jauh lebih luas dibandingkan wilayah daratnya. Tercatat bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan sebesar 6,4 juta km persegi.

Potensi Indonesia pada bidang maritim tidak hanya didukung oleh wilayah perairannya yang luas, namun juga didukung oleh jumlah pulau yang mencapai ribuan. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pulau besar dan kecil di negara ini berjumlah 17.508 pulau (Dewi, 2024). Puluhan ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Akan tetapi, julukan Indonesia sebagai negara kepulauan bukan satu-satunya julukan yang dimiliki Indonesia berdasarkan potensi perairannya. Berdasarkan 3 aspek, yaitu sejarah, geografis, dan budaya, Indonesia juga dikenal sebagai bangsa maritim.

Sejarah panjang kerajaan-kerajaan bercorak maritim di Nusantara menjadi bukti yang kuat bahwa Indonesia merupakan bangsa maritim. Indonesia atau yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan Nusantara pernah mencapai kemegahan sebagai kesatuan maritim dan kekuatan laut yang berjaya (Setiawan, 2020). Tidak hanya aspek sejarah, letak dan kondisi geografis memperkuat status Indonesia sebagai bangsa maritim. Aspek selanjutnya yang menentukan apakah Indonesia merupakan bangsa maritim atau bukan adalah budaya, khususnya budaya maritim. Budaya maritim berkaitan dengan jati diri dan cara pandang masyarakat (Hanggarini dkk, 2022). Budaya maritim dimaksudkan untuk aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan laut. Indonesia dikatakan sebagai negara maritim karena karakter dan teknologi masyarakat Indonesia, terutama yang berada di pesisir, menggambarkan kedekatan masyarakat dengan aktivitas kelautan.

Segala keuntungan yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan bangsa maritim tidak lepas dari yang namanya tantangan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah konflik terkait batas wilayah. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi konflik terkait Pulau Sipadan-Ligitan, Pulau Sebatik, dan Blok Ambalat dengan Malaysia serta sengketa perbatasan dengan Timor Leste (Harruma, 2022). Tidak hanya dengan kedua negara



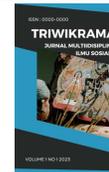
tetangganya, Indonesia sampai hari ini juga masih berkonflik dengan China terkait Laut Natuna Utara (Iswara, 2021). Konflik perbatasan antara Indonesia dengan China cukup membingungkan dan menimbulkan pertanyaan karena jarak antara kedua negara ini sangat jauh.

Konflik antara Indonesia dengan China dipicu oleh klaim sepihak China mengenai Laut Natuna Utara melalui sembilan garis putus-putus atau yang lebih dikenal dengan istilah '*nine-dashed line*'. Melalui konsep *nine-dashed line* dan peta yang dikeluarkan pada tahun 1947, China mengklaim sekitar 90% dari seluruh wilayah Laut China Selatan (LCS). Pada awalnya, Indonesia tidak menjadi bagian dari negara-negara yang terlibat konflik dengan China terkait kepemilikan LCS, seperti Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Pertikaian antara Indonesia dengan China baru terjadi pada tahun 2010, ketika China mengklaim keseluruhan dari LCS, termasuk sebuah kawasan di utara Kepulauan Natuna, provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) (Portal Informasi Indonesia, 2020).

Sengketa wilayah yang terjadi di Laut Natuna Utara, atau yang disebut China sebagai Laut China Selatan membuat hubungan kedua negara sangat fluktuatif. Pada Januari 2020, kedua negara bersepakat untuk menghindari ketegangan yang dinilai akan merusak hubungan bilateral (BBC News Indonesia, 2020). Namun, pada Juni tahun 2020, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri pada saat itu kembali menegaskan bahwa Republik Indonesia (RI) menolak negosiasi terkait Laut Natuna Utara, termasuk di dalamnya Kepulauan Natuna (CNN Indonesia, 2020). Pernyataan ini menyiratkan bahwa RI tidak menerima kompromi atas sengketa wilayah yang Tengah berlangsung. Di lain pihak, Beijing, berdasarkan pernyataan dari Felix Chang (peneliti senior Foreign Policy Research Institute), yakin dapat membungkam pemerintah Indonesia yang tidak memiliki pilihan selain mengakomodasi kehadiran China (CNN Indonesia, 2020).

Sejak pertama kali menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1950, Indonesia dan China telah melalui pasang surut. Hubungan yang terjalin antara kedua negara diwarnai dengan keharmonisan dan ketegangan di saat yang bersamaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, sengketa wilayah menjadi alasan di balik ketegangan yang terjadi. Meskipun demikian, kedua negara berupaya untuk terus berkomitmen dalam menyelesaikan masalah melalui cara-cara damai, seperti dialog dan kolaborasi (Panggaru, 2024). Komitmen Indonesia dan China untuk menjaga hubungan baik telah terbukti dari jalinan kerja sama di berbagai bidang. Komitmen tersebut kembali dibuktikan melalui kerja sama pengembangan kapasitas diplomat dan pelatihan angkatan bersenjata (Tempo, 2024).

Indonesia dan China tidak hanya berkomitmen untuk menjalin hubungan bilateral yang positif. Kedua negara juga memiliki keinginan yang sama, yaitu menciptakan stabilitas di kawasan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 9 November 2024 di Beijing, Indonesia dan China mengumumkan bahwa keduanya telah menyepakati kerja sama pada bidang maritim (Kemlu, 2024). Kesepakatan yang disebut dengan sebagai '*Joint Statement*' ini telah menuai kontroversi, baik dari dalam maupun luar negeri Indonesia. Banyak pihak, terutama negara-negara ASEAN, mempertanyakan mengenai posisi Indonesia dalam sengketa LCS. Pertanyaan tersebut muncul dikarenakan butir ke-9 dari *Joint Statement* Indonesia-China yang berjudul '*The Two Sides will Jointly Create More Bright Spots in Maritime Cooperation*'. Beberapa pihak menilai



bahwa isi dari butir tersebut menyatakan bahwa Indonesia mengakui klaim China tentang *Nine Dashed Line* (IMC News, 2024).

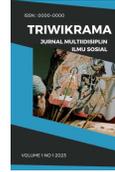
Kontroversi dan pro-kontra yang berdatangan dari dalam dan luar negeri kemudian membuat pemerintah Indonesia segera memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Menteri Luar Negeri Indonesia saat ini, Sugiono, menegaskan kepada publik bahwa tidak akan terjadi pergeseran posisi dan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang kurang atau bahkan tidak setuju dengan kerja sama maritim ini. Adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara Indonesia yang semakin besar, terutama pada wilayah kepulauan di sekitar Laut Natuna Utara dapat menjadi alasan yang logis dari keraguan tersebut. Oleh karena itu, artikel yang berjudul ***Joint Statement Indonesia-China: Analisa Dampak Kerja Sama di Bidang Maritim terhadap Kedaulatan Negara di Laut Natuna Utara*** bertujuan untuk membahas dampak yang mungkin ditimbulkan dari kerja sama maritim Indonesia-China terhadap kedaulatan dan keamanan negara, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu Laut Natuna Utara.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait maritim dan sengketa di Laut Natuna telah dilakukan sebelumnya dengan judul 'Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna'. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2024) ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas sengketa di Laut Natuna Utara, mulai dari latar belakang, kronologis kejadian, dan dampak sengketa terhadap kondisi domestik Indonesia serta hubungan Indonesia-China. Selain itu, penelitian terdahulu terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dengan China telah dilakukan pada tahun 2023 oleh Munatama & Zhaidah dengan judul 'Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China dan Indonesia dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo 2014-2020'. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan perkembangan kerja sama antara Indonesia dengan China khususnya di bidang sosial-politik selama periode pertama kepemimpinan Jokowi selaku presiden RI. Sementara itu, penelitian terdahulu terkait dampak kerja sama antara Indonesia dengan China telah dilakukan sebelumnya oleh Fauziyyah & Paksi (2023) dengan judul 'Dampak Kerja Sama Indonesia-China dalam Proyek Investasi Nikel terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kedua Negara'. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari kerja sama di bidang pertambangan antara Indonesia dengan China terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Dari ketiga penelitian di atas, belum ada yang membahas dan menganalisis tentang kerja sama antara Indonesia dengan China pada bidang maritim serta dampak dari kerja sama tersebut terhadap kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah Laut Natuna Utara yang sampai sekarang masih menjadi wilayah sengketa. Oleh karena itu, keterbaruan penelitian ini adalah menganalisis dampak dari *Joint Statement* Indonesia-China yang disepakati pada awal pemerintahan Presiden RI ke-8 terhadap kedaulatan negara.



Konflik

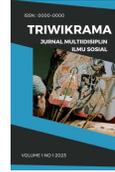
Konflik dikatakan sebagai sebuah konsep yang eksistensi atau keberadaannya jauh lebih tua dari studi Hubungan Internasional (HI) itu sendiri. Menurut Graham Evans dan Jeffrey Newnham, konflik merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika dua atau lebih aktor (negara) mengejar tujuan yang eksklusif dan saling bertentangan (Bakry, 2022). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa konflik antara Indonesia dengan China terjadi karena kedua negara ini saling bertentangan. Pertentangan ini terlihat jelas pada upaya China dalam memperluas wilayah negaranya melalui klaim *nine dashed line* atau sembilan garis putus-putus. Di sisi lain, Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan wilayah teritorialnya dari klaim sepihak China yang terbukti tidak memiliki dasar hukum.

Setiap negara di dunia pada umumnya pasti memilih untuk mempunyai hubungan diplomatik yang baik dan terjaga dengan negara-negara lain. Namun, sifat dari hubungan internasional yang sangat dinamis tidak memungkinkan terciptanya situasi global yang senantiasa kondusif. Bahkan, sejak awal dikatakan bahwa konflik muncul bersamaan dengan kehadiran umat manusia di muka bumi (Bakry, 2022). Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas hubungan antarnegara dan masyarakat di dunia, konflik terlihat sebagai suatu hal yang wajar, atau bahkan pasti terjadi. Tedd Robert Gurr dalam bukunya yang berjudul 'Peoples Versus States: Minorities at Risk in the New Century' (2000), kemudian mencoba untuk mengklasifikasikan penyebab konflik antarnegara ke dalam enam jenis. Salah satu jenis dari klasifikasi Gurr adalah konflik yang dilatarbelakangi perebutan wilayah (*territorial conflict*) (Bakry, 2022). Dalam hal ini, konflik antara Indonesia dengan China dikategorikan sebagai konflik karena perebutan wilayah. Kedua negara saling memperebutkan wilayah Laut Natuna Utara yang sekitar tahun 2010 diklaim oleh China sebagai bagian dari *nine dashed line*.

Derajat konflik menurut Steffan Wolff dimulai dari perselisihan atau sengketa hingga berujung pada perang (Bakry, 2022). Untuk saat ini, situasi konflik antara Indonesia dengan China masih berada pada tahap perselisihan atau sengketa. Meskipun hubungan diplomatik kedua negara beberapa kali memanas akibat tendensi yang meningkat di sekitar wilayah konflik, kedua belah pihak terus berkomitmen untuk menggunakan cara-cara damai untuk meredakan ketegangan.

Kerja sama

Kerja sama merupakan salah satu konsep dasar dalam studi HI yang esensial. Eksistensi dari konsep kerja sama sendiri dikatakan bersamaan dengan munculnya konflik. Ketika aktor-aktor hubungan internasional di masa lalu (negara) berpikir untuk berkonflik, di saat yang bersamaan aktor-aktor tersebut berpikir untuk bekerja sama. Pada awalnya, kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara memiliki dua tujuan utama, yaitu mewujudkan perdamaian dunia atau mencegah terjadinya peperangan. Untuk saat ini, tujuan dari diselenggarakannya kerja sama semakin meluas ke berbagai aspek kehidupan bernegara (Bakry, 2022). Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia dan China melakukan kerja sama tidak hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata. Namun, kerja sama keduanya dilakukan sebagai upaya mewujudkan kawasan yang damai dan stabil, terutama di wilayah yang menjadi sengketa.

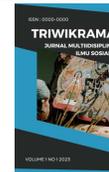


Salah satu tokoh bernama Joseph Frankel mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara akan terjadi Ketika manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi (Bakry, 2022). Meskipun demikian, mengutip langsung dari buku berjudul 'Dasar-Dasar Hubungan Internasional' karya Umar Suryadi Bakry, "...fakta menunjukkan bahwa tidak ada hasil atau manfaat nyata yang dapat diharapkan oleh negara-negara dalam kerja sama dan partisipasi internasional tersebut. Atau dengan kata lain, manfaat yang diperoleh negara-negara yang ikut ambil bagian dalam kerja sama dan partisipasi internasional masih bersifat spekulasi" (2022). Berdasarkan hal ini, manfaat ataupun dampak dari *Joint Statement* Indonesia-China di bidang maritim juga masih sebatas spekulasi atau perkiraan. Artinya, tujuan dan harapan Indonesia maupun China belum tentu terealisasikan di masa depan. Bahkan, dampak positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan dari kerja sama ini tidak dapat diukur dengan jelas. Hal ini lah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi para ahli, terutama terkait kedaulatan dan keamanan negara.

Kedaulatan

Kedaulatan dipandang sebagai sebuah pilar yang fundamental dari sistem internasional, pernyataan ini berdasarkan pada pandangan Cristina Badescu (2011) dalam bukunya yang berjudul '*Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect: Security and Human Rights*' (Bakry, 2022). Selama negara masih menjadi aktor penting dalam panggung global, kedaulatan akan tetap menjadi konsep dasar yang vital dalam studi HI. Andrew Shorten sebagaimana dikutip Umar Suryadi Bakry (2022) menyatakan bahwa kedaulatan adalah otoritas final dari negara sebagai sebuah entitas politik. Otoritas ini sendiri dikaitkan dengan hak negara atas wilayah teritorialnya. Dengan kata lain, negara yang berdaulat memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan urusan-urusan domestiknya. Selain itu, negara berdaulat juga mendapatkan hak untuk tidak diintervensi oleh pihak mana pun (Bakry, 2022). Kedaulatan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk wilayah. Setiap negara merdeka telah memiliki wilayah teritorial atau kekuasaan yang diatur oleh hukum internasional serta diakui oleh masyarakat global.

Indonesia, sebagai sebuah negara yang berdaulat, memiliki batas-batas wilayah yang merupakan suatu keniscayaan untuk menunjukkan kedaulatannya. Kedaulatan Indonesia yang meliputi wilayah darat dan lautnya, telah diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008. Berdasarkan amanat dari UUD Tahun 1945, kedaulatan tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Qothrunnada, 2023). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjaga kedaulatan tersebut sebagai salah satu upaya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat atas segala sumber daya yang dimiliki. Sangat disayangkan, hingga saat ini, sengketa perbatasan wilayah menjadi salah satu isu yang belum menemui titik terang, termasuk di Laut Natuna Utara. Permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan China harus segera ditangani, terlebih setelah kontroversi *Joint Statement* yang menuai pro-kontra dari dalam dan luar negeri.



METODE PENELITIAN

Menurut W. Gulo (2002) dalam Ismail & Ilyas (2023), metode pengumpulan data adalah suatu *statement* atau pernyataan mengenai sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Pada intinya, metode atau teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Pada penelitian yang menggunakan desain penelitian kualitatif, terdapat tiga teknik wajib, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen (Ismail & Ilyas, 2023).

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen pada umumnya digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila data yang diperoleh dari wawancara dan observasi masih kurang atau adanya keterbatasan dalam memperoleh data yang bersifat primer. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data berupa dokumen sebenarnya merupakan pelengkap dari kedua metode utama dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi dan wawancara. Akan tetapi, keterbatasan penelitian menyebabkan teknik dokumen (telaah pustaka atau *library research*) harus menjadi teknik utama dalam meneliti topik atau masalah penelitian yang diangkat.

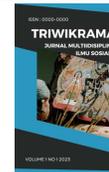
Miles dan Huberman dalam Ismail & Ilyas (2023), menekankan bahwa data yang terkumpul dari penelitian kualitatif berbeda-beda tergantung dari teknik pengumpulan data yang digunakan. Akan tetapi, data yang diperoleh dari teknik observasi, wawancara, maupun dokumen pada umumnya berupa kata-kata atau kalimat. Oleh sebab itu, data tersebut perlu dianalisis atau diolah sebelum digunakan. Miles dan Huberman kemudian membuat pola umum analisis data dengan mengikuti model alir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan prinsip bebas-aktif dalam menjalankan politik dan hubungan luar negerinya. Prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan berbagai negara di dunia tanpa harus condong ke salah satu blok atau kubu. Salah satu negara yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia adalah Republik Rakyat China (RRC). Indonesia menjadi salah satu dari sekian negara yang paling awal menjalin hubungan diplomatik yang resmi dengan pemerintah China (China Radio Internasional, 2024).

Hubungan diplomatik Indonesia-China mulai terjalin sejak tanggal 13 April tahun 1950. Saat ini, persahabatan antara kedua negara telah memasuki usia 74 tahun. Dalam perjalanannya, Indonesia dan China telah melalui begitu banyak pasang surut (Oratmangun, 2020). Meskipun demikian, kedua negara selalu berhasil untuk meredam konflik atau ketegangan yang terjadi. Panggaru (2024) mengemukakan evolusi hubungan diplomatik keduanya, yaitu sebagai berikut.

1. Awal mula hubungan diplomatik (1950-1965)
2. Masa ketegangan (1965-1990)
3. Normalisasi dan pemulihan hubungan (1990-an)



4. Era kerja sama strategis (2000-sekarang)

Pada era kerja sama strategis yang berlangsung hingga saat ini, hubungan antara Indonesia dengan China dapat dikatakan menunjukkan tren yang positif. Kedua negara terlibat aktif dalam berbagai forum diskusi dan kerja sama. Tren positif ini paling terlihat pada masa kepemimpinan Joko Widodo, yaitu pada 2014-2019 (periode 1) dan 2019-2024 (periode 2). Oleh karena itu, Menurut Wu Zhiwei, *Counsellor of Economic and Commercial Counsellor's Office* Kedutaan Besar China untuk Indonesia, hubungan antara kedua negara ini memasuki puncak keemasan pada era Jokowi (Fadilah, 2024). Namun, sebagaimana sifat dari hubungan internasional yang penuh dinamika, hubungan Indonesia-China juga tidak selamanya stabil. Ketidakstabilan ini salah satunya dipicu oleh ketegangan di wilayah Laut Natuna Utara karena klaim dari pihak China dengan menggunakan peta yang dikeluarkan pada 1947 (Putra dkk, 2024).

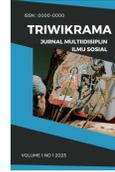
Sengketa Wilayah antara Indonesia-China di Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara, sebuah perairan yang terletak di antara Pulau Kalimantan dengan semenanjung Malaysia yang memiliki luas sekitar 272 ribu km persegi, merupakan bagian dari ZEE Indonesia (Khoirul, 2024). Wilayah Laut Natuna Utara menyimpan begitu banyak sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Kekayaan sumber daya di Laut Natuna Utara yang seharusnya menjadi milik pemerintah dan rakyat Indonesia ini justru menjadi objek sengketa, terutama dengan China.

Sengketa batas wilayah di Laut Natuna Utara muncul karena pihak China yang mengklaim dan menganggap bahwa wilayah laut tersebut termasuk ke dalam *nine dashed line*, sembilan garis putus-putus yang terdapat pada peta China tahun 1947. Tentu saja, klaim China atas wilayah tersebut bertentangan dengan *United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Berdasarkan konvensi tersebut, wilayah sengketa merupakan teritorial resmi negara Indonesia karena Laut Natuna Utara berada pada 200 mil garis pangkal kepulauan Indonesia (Khoirul, 2024). Dengan demikian, klaim China atas Laut Natuna Utara yang dianggapnya sebagai bagian dari Laut China Selatan, merupakan suatu kesalahan dan menunjukkan bahwa China tidak menghormati hukum internasional terkait batas-batas laut setiap negara.

Indonesia dan China belum pernah melakukan perundingan resmi terkait sengketa ini karena pemerintah Indonesia secara tegas tidak mengakui klaim Beijing atas *nine dashed line*. Dalam hal ini, Indonesia hanya mengakui hak China sebagai negara tetangga untuk berlayar dan beraktivitas di wilayah ZEE Indonesia tersebut selama tidak melanggar hukum dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Khoirul, 2024). Sayangnya, tidak jarang pihak China tidak menghormati hal tersebut.

Pada tahun 2020, sebuah insiden yang menarik perhatian dunia terjadi Ketika sekitar 50 kapal nelayan China bersama dengan kapal-kapal *Coast Guard* China masuk ke dalam ZEE Indonesia tanpa izin hingga melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini tentu saja memicu kemarahan pemerintah dan segenap rakyat Indonesia. Menanggapi tindakan China, pemerintah Indonesia mengirimkan kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat tempur yang dimaksudkan untuk mengusir kapal-kapal China. Tidak berhenti di situ, sebagai penegasan



kembali kedaulatan negara atas Laut Natuna Utara, Presiden RI ke-7 akhirnya berkunjung ke pulau Natuna Besar (Khoirul, 2024).

Sengketa perbatasan wilayah di Laut Natuna Utara menjadi bukti dari dinamika atau kompleksitas hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan China. Ketika tendensi di wilayah sengketa meningkat, ini akan memengaruhi hubungan kerja sama yang terjalin antara kedua negara, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, kedua negara perlu melakukan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan atau tindakan apa pun yang akan memengaruhi hubungan keduanya di masa depan. Indonesia khususnya, sebagai negara yang menempati posisi strategis di kawasan, perlu mengadopsi pendekatan diplomatik yang fleksibel untuk menjaga kedaulatan wilayah dan mempertahankan hubungan baik dengan China, sekaligus mendukung stabilitas kawasan Indo-Pasifik (Fahmi, 2024).

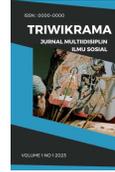
Joint Statement Indonesia-China di Bidang Maritim

Indonesia dan China telah menjalin hubungan kerja sama di berbagai bidang, seperti perdagangan, sosial-budaya, kesehatan, dan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Selain untuk meningkatkan perekonomian keduanya, kerja sama yang dilakukan pada berbagai sektor tersebut juga bertujuan untuk menjaga kestabilan dari hubungan diplomatik Indonesia-China. Berbicara mengenai kestabilan hubungan diplomatik, sampai hari ini Indonesia dan China masih memiliki sengketa di wilayah Laut Natuna Utara. Meskipun demikian, keduanya tetap mempertahankan kerja sama yang ada sembari mencari solusi atau jalan keluar untuk konflik perbatasan tersebut.

Salah satu upaya terbaru yang coba untuk dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan China agar hubungan keduanya tetap pada tren positif adalah membuat *Joint Statement*. Kerja sama berupa *Joint Statement* atau pernyataan bersama ini berfokus pada bidang maritim, sesuai dengan bidang sengketa atau perkara kedua negara tersebut. Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Xi Jinping menyepakati kerja sama maritim ini pada pertemuan keduanya di Beijing.

Kerja sama bilateral berupa *Joint Statement* adalah dokumen pernyataan bersama antara kedua negara tentang kesepakatan melakukan sebuah program, dokumen kerja sama ini bersifat komprehensif dan mengikat pada prosesnya (Cekricek, 2022). Dalam hal ini, Indonesia-China telah menerbitkan dokumen pernyataan bersama pada 9 November yang memuat 14 poin. Selanjutnya, dari ke-14 poin tersebut, terdapat 7 poin yang menjadi hal utama dalam *Joint Statement* tersebut. Berikut merupakan ke-7 poin penting dalam pernyataan bersama antara Indonesia dengan China (Kemlu, 2024).

- *The two sides will jointly build stronger political mutual trust*
- *The two sides will jointly forge a new pattern of development and cooperations on all fronts*
- *The two sides will jointly enhance people-to-people exchanges and ties*
- *The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation*
- *The two sides will jointly build a new pillar of bilateral defence and security cooperation*
- *The two sides will jointly uphold regional development, prosperity, and stability*
- *The two sides will jointly conduct closer major-country coordination to tackle global challenges.*



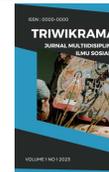
Pertemuan antara kedua pimpinan negara, yaitu Indonesia dan China di Beijing beberapa pada pekan pertama November 2024 telah menghasilkan serangkaian kerja sama yang semakin kompleks. Kerja sama kedua negara semakin meningkat karena tidak terbatas pada bidang-bidang yang sering disepakati sejak keduanya menjalin hubungan diplomatik. Bahkan, kerja sama keduanya di bidang maritim sebagaimana yang termuat dalam poin ke-9 *Joint Statement*, yaitu “*the two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation*” telah menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak lagi dibatasi oleh isu atau sengketa yang terjadi. Diketahui bersama bahwa Indonesia dan China telah berseteru mengenai kepemilikan wilayah Laut Natuna Utara sejak 2010, namun sengketa ini tidak menghalangi Indonesia dan China untuk menjalin kerja sama maritim.

Indonesia dan China sebenarnya telah melakukan beberapa kerja sama di bidang kelautan dan perikanan selama beberapa tahun terakhir. Namun, adanya konflik perbatasan di sekitar Kepulauan Natuna Utara dapat dikatakan telah menghambat terjadinya peningkatan kerja sama maritim yang lebih besar. Ketegangan demi ketegangan, terutama pada tahun 2020 semakin membatasi adanya ruang kolaborasi maritim antara Indonesia dengan China meskipun kedua negara tersebut berulang kali menegaskan bahwa keduanya akan terus menempuh cara-cara yang damai dan penuh martabat. Olehnya itu, dapat dikatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk melakukan *Joint Statement* dengan Beijing adalah langkah yang baru dan berani.

Pada poin ke-9 *Joint Statement* tersebut, dimuat bahwa kerja sama maritim yang ditempuh keduanya merupakan komponen yang penting dalam mencapai tingkat kemitraan strategis dan komprehensif. Kerja sama ini akan membuka jalan untuk pelaksanaan proyek-proyek maritim yang lebih bersifat eksploratif. Tidak hanya itu, kerja sama maritim antara keduanya juga dimaksudkan untuk meningkatkan sistem tata kelola maritim, menjaga kebersihan dan keindahan laut, dan menjaga perdamaian dan kesejahteraan maritim. Dalam menjalin kerja sama maritim, kedua negara sepakat untuk menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menguntungkan serta nilai-nilai kesetaraan dan fleksibilitas. Meskipun muatan kerja sama dari poin ke-9 ini mencakup prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk menjamin kerja sama yang maju dan adil, namun tidak sedikit pihak yang bersikap skeptis terhadap pernyataan bersama tersebut.

Dampak *Joint Statement* terhadap Kedaulatan Negara di Laut Natuna Utara

Pernyataan bersama antara pemerintah pusat Indonesia dengan Beijing pada kenyataannya bukanlah kerja sama di bidang maritim yang pertama. Akan tetapi, kerja sama ini dapat dikatakan menjadi kerja sama yang paling kontroversial. Ada dua kemungkinan yang menjadi alasan mengapa sikap dan pernyataan pro-kontra berdatangan tidak hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Pertama, kerja sama maritim yang dilakukan pada awal pemerintahan Prabowo ini memiliki peningkatan yang signifikan dari kerja sama di bidang kelautan dan perikanan beberapa pemerintahan sebelumnya. Kedua, atau alasan yang paling mungkin adalah karena poin ke-9 menyinggung tentang pengembangan bersama wilayah yang ‘tumpang-tindih’.

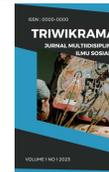


Salah satu kalimat yang dimuat dalam poin ke-9 *Joint Statement* Indonesia-China, yaitu “*The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims...*” memancing pihak dari dalam dan luar negeri untuk menanggapi sekaligus mengkritisi pernyataan bersama kedua negara. Hal ini lantaran pernyataan tersebut dinilai kurang jelas terkait wilayah yang dimaksud sebagai *overlapping claims* sehingga hampir seluruh pihak berasumsi bahwa itu adalah Laut Natuna Utara. Jika benar adanya, para pakar maupun tokoh politik dalam negeri cukup menyayangkan keputusan pemerintah Indonesia. Keputusan Presiden Prabowo untuk menjalin kerja sama maritim di wilayah yang menjadi sengketa selama lebih dari satu dekade dianggap menyimpang dari sikap dan keputusan Indonesia selama ini. Pada beberapa pemerintahan sebelumnya, Indonesia selalu menegaskan bahwa wilayah Laut Natuna Utara merupakan kepemilikan resmi dari NKRI dan tidak akan ada kompromi terkait hal tersebut. Tokoh-tokoh dalam negeri khawatir apabila peristiwa lepasnya wilayah Indonesia kembali terulang, seperti yang terjadi pada pulau Sipadan-Ligitan yang kini menjadi teritorial Malaysia setelah mahkamah internasional memutuskannya pada 2002. Oleh karena itu, banyak pihak yang mencoba untuk memperingatkan agar pemerintah Indonesia sebaiknya kembali mempertimbangkan kerja sama tersebut sebelum menyesali *Joint Statement* tersebut di kemudian hari.

Masukan dan kritikan tidak hanya datang dari dalam negeri Indonesia, namun juga dari negara-negara tetangga, terutama yang turut mengalami sengketa wilayah dengan China. Adanya keinginan Indonesia-China untuk melakukan kerja sama dan pengembangan di area yang menjadi sengketa menimbulkan pertanyaan terkait posisi Indonesia dalam konflik perbatasan regional di kawasan Indo-Pasifik, yaitu klaim *nine-dashed line* China. Berbagai negara menilai bahwa Indonesia harus kembali menegaskan keberpihakannya dalam kasus sembilan garis putus-putus yang telah berlangsung sejak 1950-an.

Masukan, kritikan, dan sikap pro-kontra yang datang dari berbagai pihak sudah sepatutnya menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah pusat Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah mencoba untuk menegaskan dan meyakinkan seluruh pihak bahwa poin ke-9 dalam *Joint Statement* Indonesia-China tidak akan mengubah sikap pemerintah terkait sengketa di Laut China Utara atau pun *nine-dashed line*, namun pernyataan tersebut tetap tidak cukup untuk meyakinkan seluruh pihak yang menyampaikan keraguan dan kekhawatirannya.

Melihat berbagai respons yang hadir setelah Indonesia dan China menyepakati kerja sama di bidang maritim, maka dampak dari kerja sama tersebut menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Dari sudut pandang positif dan optimis, kerja sama ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat kerja sama, yaitu Indonesia dan China. Hubungan kedua negara yang sejak awal terjalin dengan baik akan menuju arah atau tren yang semakin positif. Tidak hanya keuntungan ekonomi semata, sengketa atau ketegangan di wilayah konflik juga akan mereda, meski pada titik tertentu tetap terdapat kemungkinan kembali memanas. Namun, jika benar kerja sama maritim tersebut dilakukan salah satunya untuk mencapai titik terang terkait isu perbatasan, maka ketegangan di wilayah Laut Natuna Utara

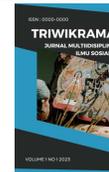


akan menjadi fokus kedua negara. Sebaliknya, dari sudut pandang negatif dan pesimis, maka kerja sama ini akan berujung pada lepasnya status Laut Natuna Utara sebagai ZEE Indonesia secara perlahan-lahan. Tidak hanya itu, kerja sama ini akan menimbulkan permasalahan baru terkait hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang juga sedang bersengketa dengan China. Hubungan persahabatan Indonesia dengan ASEAN, khususnya Malaysia, Vietnam, dan Filipina akan terancam dan berujung pada pemutusan kerja sama hingga hubungan diplomatik jika Indonesia terbukti berpihak kepada China. Pada akhirnya, dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan dari kerja sama ini akan sangat mengancam keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Joint Statement* atau kerja sama Indonesia-China di bidang maritim memiliki dampak positif dan negatif. Kerja sama ini dapat mempererat hubungan Indonesia dengan salah satu mitra terbesarnya, yaitu China. Kerja sama ini juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia melalui bidang-bidang kerja sama yang termuat dalam pernyataan bersama kedua negara. Selain itu, kerja sama ini menjadi cara yang cukup ampuh untuk meredakan ketegangan antara kedua negara di wilayah Laut Natuna Utara yang menjadi wilayah sengketa. Meskipun demikian, kerja sama ini dapat mengakibatkan lepasnya wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya secara perlahan-lahan. Bahkan kerja sama ini juga dapat menimbulkan ketegangan antara Indonesia dengan ASEAN yang merupakan negara-negara tetangga dan sahabat Indonesia. Apabila kedua hal tersebut terjadi, maka dampak terburuk dari kerja sama ini akan berakhir pada ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia. Berdasarkan kemungkinan buruk ini, pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah pusat yang saat ini berada pada kepemimpinan Presiden ke-8 hendaknya melakukan peninjauan kembali. Selain karena adanya kemungkinan ancaman terhadap kedaulatan negara, perlunya peninjauan kembali atas kerja sama ini dimaksudkan untuk memperbaiki persepsi publik pada skala domestik, regional, dan internasional terkait keberpihakan Indonesia pada sengketa wilayah *nine-dashed line*.

Penelitian yang menganalisis terkait dampak kerja sama Indonesia-China di bidang maritim terhadap kedaulatan negara ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama sehingga penelitian ini sangat terbatas. Keterbatasan penelitian juga terletak pada jangka waktu penelitian yang dekat dari pertama kali isu *Joint Statement* ini menjadi kontroversi di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini juga terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian selanjutnya lebih baik dilaksanakan setelah kerja sama maritim antara Indonesia dengan China telah berjalan selama 1-3 tahun sehingga dampak dari kerja sama tersebut dapat lebih mudah dianalisis.

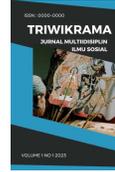


UCAPAN TERIMA KASIH

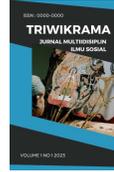
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak/ibu dosen pada mata kuliah Studi Kebijakan Maritim, Departemen Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin atas bimbingannya selama penelitian berlangsung. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, U. S., 2022. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- BBC News Indonesia, 2020. *Natuna: China dan Indonesia Sepakat Tidak Ada Sengketa Soal ZEE, 'Demi Stabilitas Kawasan'*. URL: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses pada 21 November 2024.
- Cekricek, 2022. *Joint Statement*. URL: <https://cekricek.id/joint-statement/>. Diakses pada 25 November 2024.
- China Radio International, 2024. *Perkembangan Hubungan Indonesia-Tiongkok Sejak 75 Tahun Berdirinya*. RRT. URL: <https://indonesian.cri.cn/2024/09/29/ARTIc4obRj7Fyv4pOW7NUMaN240929.shtml>. Diakses pada 20 November 2024.
- CNN Indonesia, 2020. *Laut China Selatan Memanas, RI Tolak Nego China Soal Natuna*. URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200614073325-106-513088/laut-china-selatan-memanas-ri-tolak-nego-china-soal-natuna>. Diakses pada 21 November 2024.
- Dewi., 2024. *Berapa Jumlah Pulau di Indonesia? Ini Jawabannya*. URL: <https://www.kompas.com/skola/read/2024/08/21/103000569/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia-ini-jawabannya-->. Diakses pada 20 November 2024.
- Fadhillah & Adhi, 2022. *Berapa Luas Negara Indonesia?*. URL: <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/01/170000370/berapa-luas-negara-indonesia->. Diakses pada 20 November 2024.
- Fadilah, 2024. *China Sebut Hubungan dengan RI Capai Puncak Keemasan di Era Jokowi*. URL: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7340017/china-sebut-hubungan-dengan-ri-capai-puncak-keemasan-di-era-jokowi>. Diakses pada 1 Desember 2024.
- Fahmi, 2024. *Diplomasi dan Kedaulatan di Laut China Selatan*. URL: <https://www.antaraneews.com/berita/4471313/diplomasi-dan-kedaulatan-di-laut-china-selatan?page=all>. Diakses pada 29 November 2024.
- Fauziyyah, P.Z., 2023. Dampak Kerja Sama Indonesia-China dalam Proyek Investasi Nikel terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kedua Negara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 86-104.
- Hanggarini, dkk., 2022. Budaya Maritim dan Diplomasi Maritim untuk Kepentingan Nasional. *Indonesian Perspective*. 164-179.
- Harruma, 2022. *Sengketa-Sengketa Perbatasan di Indonesia*. URL: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/01150091/sengketa-sengketa-perbatasan-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 20 November 2024.



- IMC News, 2024. *Joint Statement Indonesia-China, Menlu Tegaskan Tak Ada Pergeseran Kedaulatan di Laut China Selatan*. URL: <https://imcnews.id/read/2024/12/03/24536/joint-statement-indonesiachina-menlu-tegaskan-tak-ada-pergeseran-kedaulatan-di-laut-china-selatan>. Diakses pada 5 Desember 2024
- IMC News, 2024. *Kontroversi Joint Statement Butir ke-9 antara Indonesia dan China: Keputusan yang Tepat?*. URL: <https://imcnews.id/read/2024/11/26/24507/kontroversi-joint-statement-butir-ke-9-antara-indonesia-dan-china-keputusan-yang-tepat>. Diakses pada 30 November 2024.
- Ismail & Ilyas, 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Iswara, 2021. *Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim sebagai Wilayahnya*. URL: <https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all>. Diakses pada 20 November 2024.
- Kemlu, 2024. *Joint Statement Between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future, Beijing, November 9, 2024*. URL: <https://kemlu.go.id/daftar-joint-statement/joint-statement-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-on-advancing-the-comprehensive-strategic-partnership-and--the-china-indonesia-community-with-a-shared-future?type=publication>. Diakses pada 1 Desember 2024.
- Kemlu, 2024. *Keterangan Pers tentang Kerja Sama Maritim RI Tiongkok dalam Pernyataan Bersama RI-Tiongkok, Beijing 9 November 2024*. URL: <https://kemlu.go.id/berita/keterangan-pers-tentang--kerja-sama-maritim-ri-tiongkok-dalam--pernyataan-bersama-ri-tiongkok?type=publication>. Diakses pada 24 November 2024.
- Khoirul, 2024. *Bagaimana Sejarah Munculnya Sengketa Batas Wilayah Laut Natuna?*. URL: <https://intisari.grid.id/read/034016616/bagaimana-sejarah-munculnya-sengketa-batas-wilayah-laut-natuna>. Diakses pada 20 November 2024.
- Munatama, A. & Zhaidah, K., 2023. Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China dan Indonesia dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo 2014-2020. *Jurnal Artefak*. 77-88.
- Oratmangun, 2020. *Indonesia-China: Membangun Kemitraan, Sinergi, dan Solidaritas*. URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/18420681/indonesia-china-membangun-kemitraan-sinergi-dan-solidaritas>. Diakses pada 1 Desember 2024.
- Panggaru, 2024. *Hubungan Diplomatik antara China dan Indonesia sejak Tahun 1950*. URL: https://bpi.or.id/artikel-31-Hubungan_Diplomatik_Antara_China_dan_Indonesia_Sejak_Tahun_1950.html. Diakses pada 23 November 2024.
- Portal Informasi Indonesia, 2020. *Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara*. URL: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>. Diakses pada 20 November 2024.



-
- Putra, M.R.S., 2024. Dampak Konflik Sengketa Laut China Selatan terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Hukum Internasional. *JLEB: Journal of Law Educaton and Business*.944-952.
- Qothrunnada, 2023. *Ini Wilayah yang Meliputi Kedaulatan NKRI Menurut Undang-Undang*. URL: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6974952/ini-wilayah-yang-meliputi-kedaulatan-nkri-menurut-undang-undang>. Diakses pada 23 November 2024.
- Rachmawati, D.P., 2024. Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna. *Pubmedia Social and Humanities*. 1-14.
- Setiawan, 2020. *Peradaban Maritim Indonesia*. URL: <https://knti.or.id/peradaban-maritim-indonesia/>. Diakses pada 20 November 2024.
- Tempo, 2024. *Indonesia dan China Memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif*. URL: <https://www.tempo.co/internasional/indonesia-dan-cina-memperkuat-kemitraan-strategis-komprehensif--25846>. Diakses pada 23 November 2024.